

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahsin Thohari, 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga),

Ali Marwan Hsb, 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press,

Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses,

Fajlurrahman jurdi, 2007, *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revatalisasi moral hakim*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya,

Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga,

Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Cetakan ke-1 Bandung, Alumni,

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta,

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta,

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka : Jakarta,

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram Universty Press,

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Thalib, & Hamidi, J. Ni'matul Huda, 2010, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

JURNAL

Anwar Anwar. Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*. Volume 20, Nomor 1, 2018,

Elenabella, Violeta, and Friderikus Nopeli Giawa. Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)* Vol.3, No. 6 Juni 2025,

- Fadlail, Ach. "Desain ideal amandemen UUD 1945: Antara pembatasan masa jabatan dan penguatan sistem presidensial." *Jurnal Kajian Konstitusi* 5.1, 2025.
- Hendra Wahanu Prabandani, Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 N0. 03, Oktober 2015,
- Joko Susilo. Perspektif Presidential Threshold Terhadap Regulasi Pemilihan Umum Dalam Kerangka Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 24. Nomor 2, 2025,
- Mohammad Ilham Agang. Penegakan Hukum Pemilu Untuk Pemilu Berintegritas. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Volume 1. Nomor 1, 2023.
- Muhammad Firdaus, and Ari Susanto. Konstitusi Dan Amandemen Uud 1945. 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2. Nomor 2, 2022.
- Muhammad Suri. Makna Kedaulatan Rakyat Dalam Praktik Demokrasi Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan*, 2025,
- Na'imah, H. Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. 3. 2015,
- Nasirin, Anas Anwar, and Abdurakhman Abdurakhman. Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* Volume 7, Nomor 1, 2024,
- Raenaldi, Reza. *Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rizqi, R. Efektivitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 1, No. 03, Juli 2022,
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 11, Nomor 1, 2022,

- Saleh, O. & et al. Partai Golkar Pada Masa Orde Baru di Gorontalo Tahun 1977-1998. *JHCJ: Jambura History and Culture Journal*. Volume 4, Nomor 1. 2022,
- Satia, Agil Burhan, Cicik Nike Rimayani, and Hesti Nuraini. Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3, Nomor 1, 2019,
- Sitanggang, Ester Nathania Davita, Agustin Widjiastuti, and Dave Tedjokusumo. The Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Yang Konsisten Dan Terencana. *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 5 No 8, 2024,
- Sunardi, Ardi, et al. Krisis Moneter 1997-1998: Akar Penyebab, Dampak Ekonomi, Dan Kebijakan Penanganan Di Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan* Volume 5. Nomor 7, 2024,
- Syahfira, Wan Intan, et al. Demokrasi Membangun Sistem Pendidikan Pada Pemerintahan di Indonesia. *Ar-raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, Volume 2, Nomor 3, 2024,
- Triono, Triono. 2014, Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu." *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 11, Nomor 1.
- Urwatul Wutsqah, and Erham Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues*, Volume 4, Nomor 2, 2024,
- Wardhani, L. C. Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 3, Nomor 2, 2019,
- Wulandari, Fedri Yani, et al. Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Bangsa dan Bernegara. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, 2024,
- Yani, Ahmad. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, Nomor 2, 2018,
- Yusa Farchan. "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru." *Jurnal Adhikari* Volume 1. Nomor 3, 2022,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

